



# Buletin Parlementaria



3 Sektor Perdagangan  
Pengerak  
Kesejahteraan  
Masyarakat



10 Soroti Proyek  
Food Estate di  
Kalimantan



DPR RI Dorong  
Partisipasi Aktif  
Parlemen Dunia  
Atasi Isu Air



Calon Jemaah Haji  
Diharap Gunakan  
Visa Resmi

Nomor 1293/III/V/2024 Mei 2024



9 772614 339005



## Tinjau RSUD yang Butuh Penambahan Alkes dan Nakes



# Tinjau RSUD yang Butuh Penambahan Alkes dan Nakes

**K**omisi IX DPR RI mengunjungi beberapa RSUD di Indonesia. Salah satu tim kunjungan kerja spesifik melawat RSUD Tabanan di Bali yang diketahui berdiri sejak tahun 1953 dan merupakan Rumah Sakit Tipe B Pendidikan. Saat ini usia bangunannya sudah tua dan memerlukan perluasan pembangunan serta tenaga medis, khususnya ketersediaan dokter spesialis.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan bahwa pelayanannya di RSUD Tabanan sudah cukup bagus dan kondisi bangunan bersih. Walakin, karena usia RSUD tersebut tergolong sudah tua jadi memerlukan perluasan pembangunan dan membutuhkan fasilitas alat kesehatan serta tenaga kesehatan.

"Terkait tenaga kesehatan, kita (Komisi IX) dorong mereka supaya bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang nantinya lulusannya bisa langsung bekerja di RSUD Tabanan.



Komisi IX meninjau fasilitas dan pelayanan RSUD-RSUD di Bali, Sabtu (11/5/2024).

Kemudian terkait Alkes, kami juga dorong untuk segera mengajukan ke Kementerian Kesehatan agar langsung bisa dieksekusi karena ini sudah *urgens*," katanya usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi IX ke Tabanan, Bali, Sabtu (11/5).

Politisi Fraksi PKB itu melanjutkan bahwa kebutuhan Alkes dan SDM tersebut sudah sangat *urgens* mengingat kondisi RSUD Tabanan saat ini sudah memiliki banyak pasiennya. Sehingga, Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan kebutuhan RSUD Tabanan dalam waktu dekat.

Direktur RSUD Tabanan I Gede Sudiarta mengatakan bahwa total karyawan saat ini baru 973 orang dan masih membutuhkan perluasan pembangunan. "Kita masih butuh dokter spesialis lagi, kita juga perlu untuk perluasan area parkir dan pembangunan gedung," katanya.

Ia berharap dengan kehadiran dari Komisi IX DPR RI yang secara langsung meninjau RS bisa segera membantu dan merealisasikan hal tersebut, karena mengingat kondisi RSUD Tabanan yang ramai pasien dan berada di jantung kota. **cas/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya

# Sektor Perdagangan Penggerak Kesejahteraan Masyarakat



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani.

FOTO: EOT/PDT

**K**etua DPR RI Puan Maharani menyebutkan sektor perdagangan akan jadi penggerak kesejahteraan masyarakat di masa depan. Tak lupa tantangan ekonomi global akan menghadapi persoalan dan isu seputar pekerja migran.

“Kendati dihadapkan pada kondisi yang tidak menentu, perdagangan tetap diharapkan dapat menjadi motor penggerak mengangkat kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan,” kata Puan, Senin (6/5).

Dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, Puan pun menyoroti data dari IMF yang menyebut pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 3,2 persen tahun 2024 dan 2025. Sementara, pertumbuhan volume perdagangan tahun 2024

menurut WTO diproyeksi meningkat sebesar 2,6 persen.

Puan mengatakan, isu perdagangan tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik global. Rivalitas kekuatan besar pun menyebabkan beberapa negara menjalankan kebijakan *decoupling*, *friend-shoring*, *de-risking*.

Lebih lanjut, Puan berbicara mengenai berbagai tantangan ekonomi global mulai dari bentuk baru globalisasi yang tidak terlepas dari perkembangan geopolitik global karena terjadi perubahan pola perdagangan antar-negara, hingga desentralisasi perdagangan internasional yang menyebabkan arus perdagangan internasional lebih meningkat di antara negara-negara di kawasan. **we/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Biro Pemberitaan Parlemen



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL PENGARAH**  
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

**WAKIL PIMPINAN REDAKSI**  
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)  
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**  
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,  
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**  
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,  
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos.,  
Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhan Ivan, S.I.Kom.,  
Ubalid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto,  
Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie,  
Balggys Maeshyntha, Anju Alfonce Sitompu, Zulfikar Mubien

**FOTOGRAFER**  
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiaty, Arief Rachman,  
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Alfdillah, Gerald Opie,  
Hasri Mentari, Friederick Munchen

**ANALIS MEDIA**  
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianty Siahaan, S.I.P.,  
Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha,  
Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita,  
Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,  
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

**IT MEDIA DIGITAL**  
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Zulfikar, S.A.B.

**ADMINISTRASI**

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrinsa Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK  
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

# DPR Komitmen Selesaikan Pembahasan 43 RUU

**D**PR RI Periode 2019-2024 memiliki masa sidang yang tinggal tersisa dua kali persidangan. Di sisa masa sidang ini, DPR RI berkomitmen menuntaskan tugas-tugas konstitusional DPR RI dengan optimal.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memprioritaskan penyelesaian pembahasan sebanyak 43 (empat puluh tiga) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini masih berada dalam pembicaraan tingkat I. Pembahasan bersama pemerintah tersebut dilakukan dengan memperhatikan syarat formal pembentukan undang-undang yang telah menjadi norma dalam keputusan Mahkamah Konstitusi.

"Dalam masa sidang yang tersisa hingga berakhirnya DPR RI periode 2019-2024, maka menjadi komitmen kita bersama pemerintah untuk dapat menuntaskan pembahasan (43) RUU tersebut," kata Wakil



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat membacakan pidato Ketua DPR RI dalam Pembukaan Masa Sidang V, Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat membacakan pidato Ketua DPR RI dalam Pembukaan Masa Sidang V, Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung

Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

Adapun 43 RUU dalam pembicaraan tingkat I tersebut diantaranya adalah: RUU tentang Daerah Kepulauan; RUU tentang Hukum Acara Perdata; RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa; RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan; RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak; RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan. **bia/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



# Pengawasan DPR Fokus Berbagai Isu Strategis

**M**emasuki Masa Persidangan V, Tahun Sidang 2023-2024, fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan dan pelaksanaan Undang-Undang di berbagai bidang. Hal ini dimaksud untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat kemajuan pembangunan.

Berbagai isu strategis yang menjadi prioritas pengawasan DPR RI, antara lain, persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024, kenaikan harga pangan dan sembako, tumpang tindih regulasi dan penyelesaian masalah perantaraan, pengurangan emisi karbon dari bahan bakar fosil, ancaman risiko cuaca panas ekstrem, persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada



FOTO: JKA/PDT

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, saat menyampaikan pidato pembukaan Ketua DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

bulan November 2024, dan tekanan perekonomian global pada kondisi moneter dan fiskal.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dalam pidato pembukaan Ketua DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 mengingatkan alat kelengkapan DPR RI terkait untuk memberikan atensi khusus pada persiapan dan pelaksanaan Tahapan Pilkada serentak Tahun 2024 yang tahapannya sudah mulai dilaksanakan.

“Pemilu serentak yang akan dilaksanakan ini merupakan suatu tahapan penting kedepan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang selaras masa pemerintahannya,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5). [bia/rdn](#)



**PEMILU SERENTAK YANG AKAN DILAKSANAKAN INI MERUPAKAN SUATU TAHAPAN PENTING KEDEPAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG SELARAS MASA PEMERINTAHANNYA.**



**Rachmat Gobel**

Wakil Ketua DPR RI Bidang KORINBANG

Scan QR untuk berita selengkapnya



# RAPBN 2025 Berbasis RPJMN Presiden Baru yang Dilantik

**M**enjelang pergantian pemerintahan baru, DPR RI mengingatkan bahwa penyusunan APBN 2025 harus berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Keuangan Negara dan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berangkat dari dasar ini maka pemerintah yang menyusun RAPBN harus berbasis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang presiden terbaru yang dilantik.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

Maka dari itu, sebutnya, APBN 2025 akan dibahas usai presiden dilantik pada bulan Oktober 2024 mendatang.



Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel, saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

“Tidaklah sesuai dengan asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan, di mana APBN 2025

disusun oleh Pemerintahan yang purna tugas, akan tetapi yang harus bertanggung jawab adalah Pemerintahan yang baru,” tutur Gobel membacakan pidato rapat paripurna.

Walaupun kebijakan makro dan pokok-pokok fiskal APBN 2025 disusun oleh pemerintahan saat ini, Politisi Fraksi NasDem itu menyampaikan kebijakan tersebut hanya dasar-dasar kebijakan sementara dan alokasi belanja untuk kebutuhan rutin penyelenggaraan negara. Di mana, kebijakan makro dan pokok-pokok fiskal APBN 2025 untuk kebutuhan triwulan pertama 2025 saja.

“Pemerintahan yang baru harus dapat memiliki keleluasaan menyusun APBN,” pungkasnya.

um/rdn



# DPR Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air

**D**PR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam 'Forum Air Sedunia ke-10' (*Parliamentary Meeting of the 10<sup>th</sup> World Water Forum*) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.

"Sebagai tuan rumah kegiatan



FOTO: MUNIFPDT

Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan

maupun sukses substansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat," ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.

Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.

"Melalui tema '*Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity*', anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global," tutup Politisi Fraksi NasDem itu. [um/rdn](#)



Scan QR untuk berita selengkapnya



# Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK

**A**nggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Obon Tabroni menyampaikan pendapatnya tentang maraknya peristiwa pemutusan hubungan kerja (PHK) pada awal 2024 di berbagai perusahaan. Menurutnya sebagian besar perusahaan yang merumahkan para pegawainya banyak dari perusahaan manufaktur.

Melihat fenomena ini, ia mendesak agar pemerintah segera membuat program konkret untuk mengatasi pengangguran. "Untuk itu persoalan ini agar bisa segera kita selesaikan, instansi terkait kementerian tenaga kerja, membuat program konkret terhadap persoalan yang ada," papar Obon saat menyampaikan instruksinya pada rapat Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat selama periode Januari-Maret 2024 sudah ada 2.650 pekerja yang terkena PHK di Jawa Barat. Sedangkan daerah tertinggi yang paling banyak



Anggota Baleg DPR RI Obon Tabroni saat interupsi pada rapat Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/14/2024).

merumahkan pegawainya ada di DKI Jakarta, yakni 8.876 pekerja. Disusul Jawa Tengah sebanyak 8.648 orang.

Obon berpendapat pemerintah belum maksimal dalam mengatasi maraknya persoalan PHK.

Padahal seharusnya pemerintah memberikan jaminan bagi warga negara yang terkena PHK. "Apa yang harus dilakukan pemerintah tentu bersama dengan kita, pemerintah sudah mengeluarkan aturan tentang jaminan yang diberikan pemerintah kepada yang terkena PHK," ujarnya.

Padahal saat ini sudah ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), jaminan sosial berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). "Yang dalam hal ini pelaksanaannya belum maksimal, administrasi masih semrawut, termasuk juga pelatihan-pelatihan bagi saudara kita yang kena PHK, dan banyak lagi persoalan-persoalan lain," ungkap Obon. **ssb/aha**



# Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Harus Segera Diselesaikan

**K** anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh Indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota DPR RI Fraksi PAN tersebut.

Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan



FOTO: EOT/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah, saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).

*stunting* di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mendedukasi dan mensosialisasikan pencegahan *stunting* termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.

“Program penurunan *stunting* di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu

hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh Indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.

Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.

“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah *stunting* dan menyelamatkan hak bidan seluruh Indonesia,” tutup Dian. **uc/rdn**

**MARI KITA SELAMATKAN GENERASI EMAS INDONESIA DENGAN MENCEGAH *STUNTING* DAN MENYELAMATKAN HAK BIDAN SELURUH INDONESIA.**

**Dian Istiqomah**

Anggota Komisi IX DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Soroti Proyek *Food Estate* di Kalimantan



FOTO: JKA/PDT

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet, saat interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).

**A**nggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan *food estate* di Kalimantan. Ia mengungkapkan

kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.

“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut

merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan *food estate* di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.

“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan di-impor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.

**PEMERINTAH SUDAH DAN AKAN KEMBALI MEMECAHKAN REKOR IMPOR BERAS TERTINGGI DALAM SEJARAH, DI MANA KAMI MENILAI HAL TERSEBUT MERUPAKAN DAMPAK DARI BURUKNYA TATA KELOLA PANGAN SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR INI. AKAN TETAPI ALIH-ALIH MEREKONSTRUKSI PENGELOLAAN PANGAN PEMERINTAH MALAH TERUS MEMBUAT KEBIJAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN NILAI-NILAI KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN.**

**Slamet**

Anggota Komisi IV DPR RI

gal/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Beri Catatan terkait Pengangkatan Honorer Menjadi PPPK



FOTO: JKA/PDI

Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat.

**A**nggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyampaikan titipan terima kasih dari para konstituen kepada Pemerintah maupun DPR RI tersebut terkait telah diangkatnya pegawai honorer menjadi tenaga PPPK. Sebab, hal tersebut merupakan hal yang telah lama ditunggu masyarakat.

“Ini adalah jalan yang sangat bagus untuk mereka dihargai dan dihormati,” ungkap Syahrul Aidi Maazat ketika menyampaikan Interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-16, di Ruang Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa [14/5].

Meski demikian, ia mengungkapkan ada beberapa catatan terkait pengangkatan itu yang ia dapatkan

ketika reses lalu. Catatan tersebut seperti adanya tenaga honorer yang penempatannya tidak ditempatkan secara proporsional.

“Mereka ditempatkan di luar sekolah bahkan di luar daerah tempat mereka dulunya mengabdikan. Ada satu sekolah yang tenaga honorernya 27 orang, tepatnya di MAN 3 Kampar Lipatkain. Tenaga honorernya 10 orang, dan tidak satu pun ketika mereka ini diangkat PPPK ditempatkan di sekolah tersebut,” jelasnya.

Politisi Fraksi PKS ini berharap catatan tersebut dapat menjadi perhatian bagi Kementerian terkait. Sebab, lanjutnya, Kanwil Agama Provinsi Riau mengatakan bahwasanya yang mengaturnya bukan Kementerian agama tetapi adalah BKN.

Tak hanya itu, Syahrul Aidi pun meminta pemerintah agar melakukan verifikasi tenaga honorer. Pasalnya, ada tenaga honorer yang secara SK, mereka ditempatkan pada posisi *cleaning service*, namun secara fakta pegawai tersebut melaksanakan pekerjaan administrasi.

“Di pemerintahan, baik itu kecamatan ataupun di kabupaten, ini belum dapat mereka diangkat sebagai PPPK hanya karena SK. *Cleaning service* itu mungkin disebabkan karena ada aturan dulu tidak boleh mengangkat tenaga honorer. Tapi faktanya, sekarang mereka direkrut untuk diangkat PPPK melalui tenaga honorer, tapi secara fakta sesungguhnya mereka bukanlah *cleaning service*,” terang Syahrul.

**hal/aha**

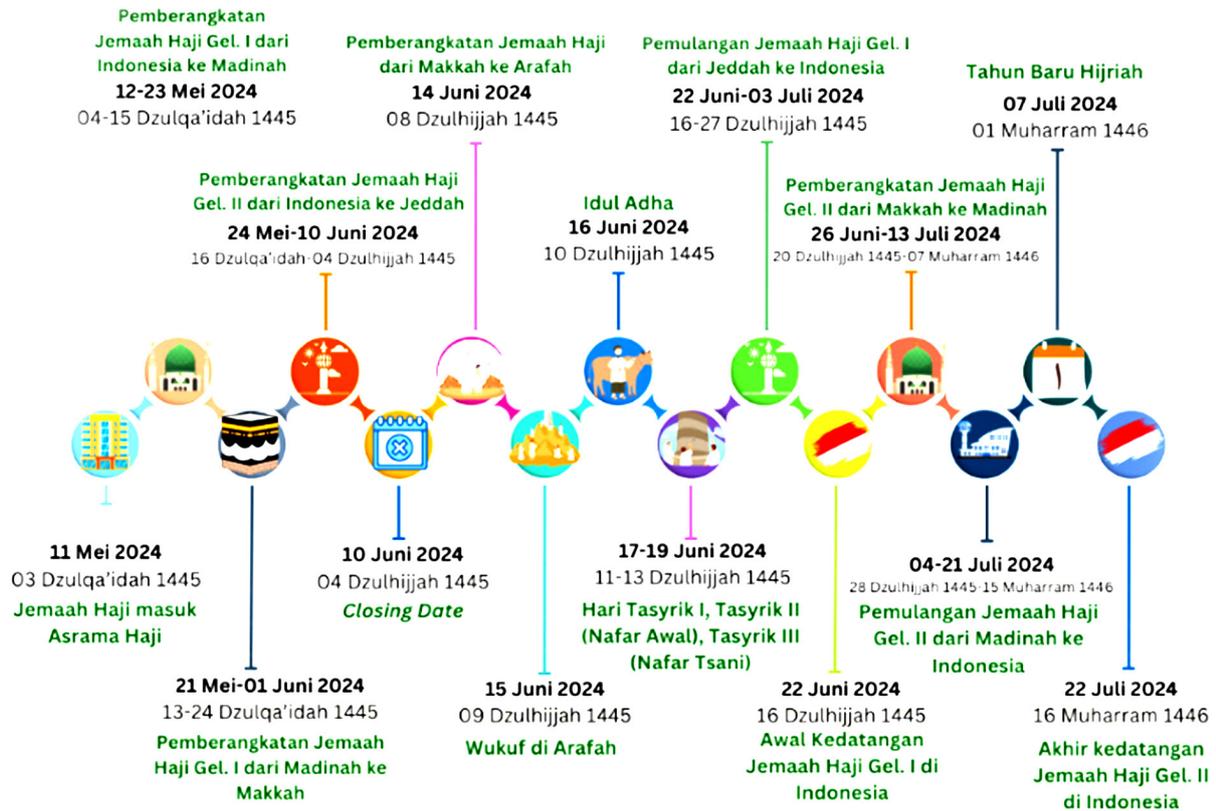
INI ADALAH JALAN YANG SANGAT BAGUS UNTUK MEREKA DIHARGAI DAN DIHORMATI. ADA BEBERAPA CATATAN TERKAIT PENGANGKATAN ITU YANG IA DAPATKAN KETIKA RESES LALU. CATATAN TERSEBUT SEPERTI ADANYA TENAGA HONORER YANG PENEMPATANNYA TIDAK DITEMPATKAN SECARA PROPORSIONAL.

**Syahrul Aidi Maazat**

Anggota Komisi V DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya





# Penambahan Kementerian Harus Miskin Struktur, Kaya Fungsi



FOTO: MR/PDT

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera.

**A**nggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti wacana perombakan nomenklatur kementerian pada pemerintahan baru mendatang. Menurutnya, jika wacana tersebut benar-benar dieksekusi, maka seharusnya harus ada kajian mendalam dari berbagai sudut pandang, apalagi menyangkut urusan sektor pendidikan.

“Saya agak menolak tentang pembengkakan (nomenklatur) kementerian ini. Seharusnya, reformasi birokrasi itu rumusnya sederhana, yaitu miskin struktur, kaya fungsi. Jangan sampai justru makin banyak struktur, malah koordinasinya jadi berantakan,” ungkap Mardani saat dirinya menjadi narasumber di salah satu wawancara virtual, di Jakarta, Jumat (10/5).



**SAYA AGAK MENOLAK TENTANG PEMBENGGAKAN (NOMENKLATUR) KEMENTERIAN INI. SEHARUSNYA, RE-FORMASI BIROKRASI ITU RUMUSNYA SEDERHANA, YAITU MISKIN STRUKTUR, KAYA FUNGSI. JANGAN SAMPAI JUSTRU MAKIN BANYAK STRUKTUR, MALAH KOORDINASINYA JADI BERANTAKAN.**

**Mardani Ali Sera**

Anggota Komisi II DPR RI

Diketahui, pada pemerintahan periode Prabowo-Gibran mendatang, jumlah nomenklatur kementerian diwacanakan akan bertambah menjadi 40. Sebelumnya, nomenklatur kementerian dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah 34.

Disebutkan bahwa alasan dari penambahan nomenklatur kementerian adalah untuk mengakomodir beban kerja negara yang cukup besar mengingat luasnya wilayah Indonesia dan padatnya jumlah penduduk. Wacana tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik.

Selanjutnya, Politisi Fraksi PKS itu mengingatkan bahwa penambahan nomenklatur kementerian termasuk yang berkaitan dengan sektor pendidikan belum tentu menjadi solusi yang cespleng. Tidak hanya itu saja, jika ego sektoral kerap terjadi, maka berpotensi akan semakin mem-perumit akibat gemuknya birokrasi.

Di mana, potensi ini, jelasnya, menimbulkan deretan permasalahan. Di antaranya muncul peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, kewenangan yang saling tumpang tindih (overlapping), dan kecenderungan penyalahgunaan kewenangan.

“Jangan sampai jadi terikat dengan birokrasi, lalu menciptakan berbagai regulasi yang saling bertentangan. Kita perlu ‘start from zero’. Coba lihat lagi penataan pendidikan Indonesia. Pemerintah harus paham dulu dasar dari masalah (pendidikan) ini,” pungkasnya. [um/rdn](#)

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Pengganti Akta Kematian untuk Minimalisasi Pemilih ‘Hantu’

Fenomena ‘Pemilih Hantu’ di tiap kali gelaran Pemilu maupun Pilkada kerap menjadi sorotan. Untuk meminimalisasi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Kamran Muchtar mendorong adanya regulasi yang memungkinkan Surat Keterangan Kepala Desa dapat digunakan sebagai pengganti Akta Kematian, sehingga bisa menjadi dasar perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bagi pemilih yang sudah meninggal dunia.

“Aturan apa sebenarnya yang membuat supaya ini tidak terjadi? Misalnya mungkin di PKPU harus lebih dipertajam (kalau) keterangan kepala desa itu boleh (digunakan). Karena tidak semua desa yang pada saat (ada warganya yang) meninggal kemudian pemerintahnya menyerahkan Akta Kematian,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem itu saat Rapat Kerja Komisi II terkait Evaluasi Pemilu 2024 pada Rabu (15/5) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.



Anggota Komisi II DPR RI Kamran Muchtar, saat mengikuti Rapat Kerja Komisi II terkait Evaluasi Pemilu 2024 di Gedung Nusantara, Rabu (15/5/2024).

Terminologi ‘pemilih hantu’ kerap digunakan untuk penggunaan surat suara oleh pemilih yang sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya. Namun, Pemilih yang sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya tersebut tetap terdapat di dalam DPT.

Pada rapat tersebut pula, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan salah satu permasalahan pada saat penyelenggaraan pemilu 2024 lalu adalah ditemukannya data pemilih yang sudah meninggal namun tidak bisa dihapus lantaran tidak ada dokumen otentik berupa Akta Kematian.

Menanggapi usul dan permasalahan yang dikemukakan oleh dari Ketua Bawaslu, Ketua Komisi II DPR RI Doli Ahmad Tanjung mengatakan hal tersebut dapat terjadi lantaran lemahnya kesadaran masyarakat untuk taat administrasi. Menurutnya, masih banyak orang yang tidak tahu atau bahkan abai terhadap tata administrasi kependudukan.



ATURAN APA SEBENARNYA YANG MEMBUAT SUPAYA INI TIDAK TERJADI? MISALNYA MUNGKIN DI PKPU HARUS LEBIH DIPERTAJAM (KALAU) KETERANGAN KEPALA DESA ITU BOLEH (DIGUNAKAN).

## Kamran Muchtar

Anggota Komisi II DPR RI

uc/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Sepakati Pembahasan RUU MK Dilanjutkan ke Rapat Paripurna

**W**akil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir memimpin Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Polhukam) dalam rangka pembahasan tingkat I pengambilan keputusan atas RUU tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam rapat ini, Komisi III dan pemerintah setuju RUU MK dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam rapat Paripurna DPR RI. Sebelumnya Adies telah meminta persetujuan dari para Anggota Komisi III dan Menteri Polhukam saat raker di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/5).

“Kami meminta persetujuan kepada Anggota Komisi III dan Pemerintah, apakah pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi dapat dilanjutkan pada Pembicaraan



FOTO: ENO/PDT

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir, usai memimpin Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM dalam rangka pembahasan tingkat I pengambilan keputusan atas RUU tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) di Senayan.

Tingkat II dalam Rapat Paripurna,” tanya Adies.

Dalam rapat ini, Adies menyampaikan bahwa pada tanggal 29 November 2023, Panja Komisi III DPR RI dan Pemerintah telah menyetujui DIM RUU tentang

Mahkamah Konstitusi dan memutuskan bahwa pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi dapat langsung dilanjutkan pada Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I atau Rapat Kerja di Komisi III.

Sebelumnya Komisi III DPR RI telah melaksanakan rapat kerja dengan Pemerintah pada tanggal 15 Februari 2023 yang lalu dan Pemerintah memberikan DIM RUU tentang Mahkamah Konstitusi, serta memutuskan bahwa pembahasan DIM dilaksanakan pada Tingkat Panja. Atas dasar penguasan tersebut, Panja melakukan pembahasan DIM RUU tentang Mahkamah Konstitusi bersama Pemerintah, sampai dengan pembahasan RUU di tingkat Timus dan Timsin. **ssb/rdn**

**KAMI MEMINTA PERSETUJUAN KEPADA ANGGOTA KOMISI III DAN PEMERINTAH, APAKAH PEMBAHASAN RUU TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAPAT DILANJUTKAN PADA PEMBICARAAN TINGKAT II DALAM RAPAT PARIPURNA.**

**Adies Kadir**

Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



# Tindaklanjuti Laporan Soal Mafia Tambang di Konawe Utara

**A**nggota Komisi III DPR RI Aboebakar Alhabsyi menekankan ke Polda Sulawesi Tenggara untuk memberantas masalah IUP (Izin Usaha Pertambangan) ilegal yang meresahkan masyarakat.

“Misalkan saja di Sulawesi Tenggara beberapa waktu terakhir, ada beberapa kelompok masyarakat yang menyoal masalah penerbitan izin tambang. Kita mau mengkonfirmasi laporan ini kepada pihak Polda. Apa memang ada dugaan praktik mafia pertambangan ilegal di Kabupaten Konawe Utara,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu

usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (15/5).

Pria yang kerap disapa Habib Aboe itu menambahkan dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut pihaknya akan melakukan pendalaman dengan mitra kerja Komisi II, yaitu Polda Sultra. Pihaknya juga akan mendalami apakah memang ada indikasi beberapa calon IUP dipaksa untuk diterbitkan.

“Apakah memang ditemukan ada indikasi kecurangan atau rekayasa dokumen IUP tambang nikel di wilayah tersebut. Kita juga ingin mengkonfirmasi adanya

upaya penerbitan izin bodong dan percepatan izin,” tegas Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Selatan I ini.

Selain dengan Polda, kata Habib Aboe, Komisi III juga akan berdiskusi dengan Kejati setempat soal korupsi di lingkungan pertambangan. Melalui pengawasan dari Komisi III ini, imbuhnya, pihaknya berharap aparat penegak hukum bisa tegak lurus dalam menjalankan tugasnya. “Sehingga sumber daya alam yang kita miliki dapat dieksploitasi dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutupnya.

— aar/rdn



FOTO: AAR/PDT

Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Alhabsyi, dalam foto bersama saat Kunjungan Kerja Spesifik di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (15/5/2024).



Scan QR untuk berita selengkapnya

# Legislator Usul Kemenhub Uji Sertifikasi Khusus Supir Bus

**A**nggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras menegaskan peristiwa kecelakaan bus Trans Putera Fajar di Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, (11/5) yang menewaskan 11 siswa SMK dan melukai 27 siswa harus menjadi titik evaluasi secara total dan menyeluruh terhadap keamanan transportasi umum di Indonesia. Salah satu yang menjadi aspek penting adalah faktor pengemudi.

“Hampir semua kecelakaan yang terjadi itu disebabkan tiga hal penting. Yang pertama personal pengemudinya, pengemudi sangat penting dibekali bagaimana keahlian mereka untuk mengemudikan kendaraan, bisa dijadikan profesi bagi mereka,” ujar Aras saat hadir sebagai narasumber Forum Legislasi “Menakar Urgensi Revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen-Biro Pemberitaan Parlemen di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

Terkait hal itu, Politisi Fraksi PPP itu mengusulkan agar Pemerintah utamanya melalui Kementerian



FOTO: AFRIPDT

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras, saat menjadi narasumber Forum Legislasi di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Perhubungan kedepannya segera menerapkan standarisasi kompetensi keahlian bagi para pengemudi bus sebagaimana telah diterapkan bagi pengemudi moda transportasi lainnya seperti profesi masinis kereta api dan profesi pilot pesawat terbang.

Aras mengingatkan Kementerian Perhubungan bersama Korlantas Polri untuk lebih tegas dalam

eva-luasi uji KIR atau uji kelayakan kendaraan moda transportasi umum seperti kendaraan bus secara rutin dan berkala. Hal itu berkaca dari kendaraan bus Trans Putera Fajar yang mengalami peristiwa kecelakaan di Subang yang tidak layak uji KIR namun masih tetap bisa beroperasi.

“Yang dibutuhkan hari ini adalah ketegasan dari pihak Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap lalu lintas itu yang harus ditingkatkan. Karena kita lihat bahwa uji KIR kendaraan (bus Trans Putera Fajar yang mengalami peristiwa kecelakaan di Subang) bisa beroperasi ini sudah mati ternyata kelaikan jalannya, itu juga dipertanyakan. Sehingga tinggal dibutuhkan ketegasan Pemerintah bersama Polri untuk melaksanakan aturan dengan baik,” tandasnya.

**pun/aha**



**YANG DIBUTUHKAN HARI INI ADALAH KETEGASAN DARI PIHAK PEMERINTAH YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP LALU LINTAS ITU YANG HARUS DITINGKATKAN. KARENA KITA LIHAT BAHWA UJI KIR KENDARAAN (BUS TRANS PUTERA FAJAR YANG MENGALAMI PERISTIWA KECELAKAAN DI SUBANG) BISA BEROPERASI INI SUDAH MATI TERNYATA KELAIKAN JALANNYA, ITU JUGA DIPERTANYAKAN.**

**Muhammad Aras**

Anggota Komisi V DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Calon Jemaah Haji Diharap Gunakan Visa Resmi

**A**nggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menayangkan banyaknya calon jemaah haji asal Indonesia tidak menggunakan visa haji resmi dari Pemerintah Arab Saudi. Ia mengingatkan kepada para jemaah bahwa ada aturan tidak boleh melaksanakan haji tanpa visa yang resmi.

Beberapa sanksi yang akan diperoleh yaitu Pemerintah Arab Saudi bisa mendeportasi jemaah hingga tidak bisa kembali ke negara tersebut hingga 10 tahun. "Kami menayangkan banyaknya calon jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji tanpa menggunakan visa haji resmi," ujar Maman, dalam acara Dialektika Demokrasi dengan tema "Antisipasi Maraknya Jemaah Haji dan Umroh Tanpa Visa Resmi, Kamis(16/5).

Selain itu, Maman. menjelaskan bahwa jemaah dengan visa non-haji juga belum tentu bisa lolos untuk



Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq, saat menjadi narasumber secara virtual dalam acara Dialektika Demokrasi di Senayan.

melaksanakan ibadah wukuf Arafah saat puncak haji karena Pemerintah

Arab Saudi memperketat aturan saat puncak haji.

Lebih lanjut, Maman meminta Kementerian Agama menindak tegas agen perjalanan (*agent travel*) yang terbukti menyalahi aturan dengan memberangkatkan jemaah haji tanpa visa yang resmi. "Agen *travel* juga harus ditindak karena mereka yang memberangkatkan," tukasnya.

Apalagi, ia menyebut, banyak jemaah haji yang gunakan visa kerja dan visa umroh untuk berhaji. Untuk itu ia mengimbau masyarakat terbiasa mematuhi aturan sehingga mereka yang datang tanpa visa haji sebaiknya pulang. **tn/aha**

**KAMI MENYAYANGKAN BANYAKNYA CALON JEMAAH HAJI YANG MELAKSANAKAN IBADAH HAJI TANPA MENGGUNAKAN VISA HAJI RESMI.**

**JEMAAH DENGAN VISA NON-HAJI JUGA BELUM TENTU BISA LOLOS UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH WUKUF ARAFAH SAAT PUNCAK HAJI KARENA PEMERINTAH ARAB SAUDI MEMPERKETAT ATURAN SAAT PUNCAK HAJI. AGEN TRAVEL JUGA HARUS DITINDAK KARENA MEREKA YANG MEMBERANGKATKAN.**

**Maman Imanul Haq**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Mitigasi Strategis terkait Polemik Efek Samping Vaksin AstraZeneca

**P**roducen Vaksin Covid-19, AstraZeneca, baru-baru ini mengakui bahwa vaksin yang diproduksi secara umum dapat menyebabkan efek samping yang sangat jarang terjadi, berupa pembekuan darah yang langka (trombositopenia). Hal itu terungkap dari para peneliti yang menganalisis data lebih dari 10 juta orang dewasa di Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani menyatakan Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah mitigasi yang strategis.

“Yang pertama, tentu saja melibatkan lembaga-lembaga penelitian, seperti apa dampak dari vaksin atau yang sering disebut dengan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI). Yang kedua, seharusnya Pemerintah juga memiliki data pembandingan, artinya kejadian di tempat A dibandingkan dengan kejadian tempat B, termasuk



FOTO: OJI/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani, saat diwawancarai Parlemenaria.

juga kejadian di tanah air sendiri. Dan yang ketiga, jika memang ada lakukan *surveillance*, apakah kemudian kasus ini menimpa warga kita setelah menerima vaksin AstraZeneca?,” ujarnya di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

Tambahnya, jika kemudian ditemukan adanya kejadian korban efek samping dari vaksin AstraZeneca ini, Pemerintah menurutnya perlu bertanggung jawab. Karena pemberian vaksin ini terjadi di saat pandemi covid-19 terjadi, di mana masyarakat tidak memiliki pilihan lain untuk dapat lolos dari pandemi selain harus mendapatkan vaksin tersebut.

“Pemerintah harus bertanggung jawab. Karena pada saat itu warga tidak memiliki pilihan lain, kecuali untuk lolos dari pandemi (masyarakat harus) mengikuti program *mandatory* yang diberlakukan oleh Pemerintah, untuk mengikuti program imunisasi dan sebagainya. Juga tidak bisa memilih vaksin apa yang bisa mereka terima, sebagiannya akhirnya menerima vaksin AstraZeneca,” tegas Politisi Fraksi PKS itu. [gal/rdn](#)



**PEMERINTAH HARUS BERTANGGUNG JAWAB. KARENA PADA SAAT ITU WARGA TIDAK MEMILIKI PILIHAN LAIN YA KECUALI UNTUK LOLOS DARI PANDEMI (MASYARAKAT HARUS) MENGIKUTI PROGRAM MANDATORY YANG DIBERLAKUKAN OLEH PEMERINTAH, UNTUK MENGIKUTI PROGRAM IMUNISASI DAN SEBAGAINYA. JUGA TIDAK BISA MEMILIH VAKSIN APA YANG BISA MEREKA TERIMA, SEBAGIANNYA AKHIRNYA MENERIMA VAKSIN ASTRAZENECA,**

## Netty Prasetyani

Anggota Komisi IX DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapny



# Komisi X Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan

**K**omisi X DPR RI berkomitmen memastikan setiap warga negara bangsa memperoleh akses pendidikan. Menanggapi isu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang naik fantastis, Komisi X sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan.

Pernyataan ini diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5).

"Menurut kami, kenaikan biaya kuliah ini tidak manusiawi. Kenaikannya bisa sampai 500 persen. Selain kami mendorong (Kemendikbudristek) meninjau ulang Permendikbud, kami (Komisi X) membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan supaya masalah seperti ini tidak berulang," ucap Dede.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, saat RDPU Komisi X DPR RI dengan Aliansi BEM SI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Mewakili Komisi X DPR RI, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menjelaskan Panja tersebut turut akan memanggil sejumlah pihak untuk menggali akar masalah. Upaya ini, menurutnya, penting agar bisa diperoleh rekomendasi yang mujarab.

Menutup pernyataannya, Dede menjelaskan asas keadilan dalam pembiayaan pendidikan harus diterapkan karena negara telah mengamanatkan akses pendidikan harus bisa diperoleh oleh setiap warga negara lewat kebijakan yang dilahirkan. — [um/rdn](#)



Scan QR untuk berita selengkapnya



# RUU Pelayaran Harus Atur Tegas Armada Asing

**A**nggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Anas Thahir menyampaikan bahwa harus ada pasal yang mengatur secara tegas larangan praktek pinjam nama untuk armada kapal asing. Menurutnya, praktek pinjam nama kerap ditemukan di berbagai daerah, termasuk daerah asalnya di Banyuwangi. Dalam konteks ini, armada milik negara asing kerap kali masuk dan beroperasi di Indonesia dengan menggunakan nama identitas masyarakat lokal.

“Jika kita sepakati ada penyempurnaan atau perubahan atas Undang-Undang Pelayaran tahun 2018 ini minimal dua hal yang saya ingin berikan catatan. Yang pertama, soal praktek pinjam nama, pesawat (kapal) asing atas nama warga negara Indonesia. Ini tidak hanya terjadi di satu daerah tapi di banyak tempat, banyak daerah,” kata Legislator Dapil Jawa Timur III itu dalam Rapat Kerja Badan Legislasi, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5).



Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Anas Thahir dalam Rapat Kerja Badan Legislasi, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Pada Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg yang membahas kajian harmonisasi RUU tentang pelayaran itu, Anas menyampaikan bahwa praktek pinjam nama ini tak

hanya menimbulkan kerugian ekonomi tetapi juga mengancam kedaulatan rakyat. Untuk itu, Anas kembali menegaskan bahwa hal tersebut harus dengan gamblang termaktub dalam revisi UU Pelayaran yang sedang dibahas.

“Kalau (praktek pinjam nama) ini kita biarkan tentu saja sangat merugikan bukan hanya merugikan dalam konteks ekonomi tapi juga mengancam kedaulatan negara. Karenanya saya berharap dalam penyempurnaan undang-undang ini ada pasal yang lebih tegas yang mengatur tentang ini, sehingga ke depan kita bisa menghentikan manipulasi praktek pinjam nama seperti ini,” tambah Politisi Fraksi PPP tersebut. **uc/rdn**

**KALAU (PRAKTEK PINJAM NAMA) INI KITA BIARKAN TENTU SAJA SANGAT MERUGIKAN BUKAN HANYA MERUGIKAN DALAM KONTEKS EKONOMI TAPI JUGA MENGANCAM KEDAULATAN NEGARA. KARENANYA SAYA BERHARAP DALAM PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG INI ADA PASAL YANG LEBIH TEGAS YANG MENGATUR TENTANG INI, SEHINGGA KE DEPAN KITA BISA MENGHENTIKAN MANIPULASI PRAKTEK PINJAM NAMA SEPERTI INI.**

**Anas Thahir**

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapny



# RUU Kementerian Negara & RUU Keimigrasian Jadi RUU Inisiatif DPR

**B**erdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan. RUU (Rancangan Undang-Undang) Kementerian Negara merupakan RUU kumulatif terbuka berdasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan bagian dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 dan Prolegnas RUU Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/1/2022-2023.

“Selanjutnya Badan Legislasi telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Kementerian Negara serta Badan Legislasi telah melakukan rapat-rapat, yaitu tanggal 14 dan 15 Mei 2024,” kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas di Ruang Rapat Baleg, Kamis (16/5).

Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 4 ayat (1) UU Dasar



Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas di Ruang Rapat Baleg, Kamis (16/5/2024).

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut UU dasar.

“Diskusi kita hanya menghapus dan menghilangkan angka 34 dari

sisi Kementerian dan juga kemarin didukung oleh pendapat dari Anggota Baleg. Walaupun begitu kita memberikan penegasan bahwa jumlah Kementerian itu harus tetap memperhatikan dari sisi efisiensi dan efektifitas,” kata Supratman.

Lebih Lanjut, dalam Rapat Badan Legislasi juga membahas Revisi UU Keimigrasian yang berlandaskan kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU/IX/2011 dan 64/PUU/IX/2011. Perubahan yang dijelaskan adalah dihilangkannya diksi “penyelidikan” dalam Pasal 16 UU Keimigrasian. Sebabnya, pertimbangan MK menyatakan orang yang berada dalam proses penyelidikan belum tentu dilakukan penyidikan.



**SELANJUTNYA BADAN LEGISLASI TELAH MEMBENTUK PANITIA KERJA (PANJA) PENYUSUNAN RUU KEMENTERIAN NEGARA SERTA BADAN LEGISLASI TELAH MELAKUKAN RAPAT-RAPAT, YAITU TANGGAL 14 DAN 15 MEI 2024.**

**Supratman Andi Agtas**

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI

tn/aha

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



# Bangun Pemahaman Mekanisme Sidang ke Mahasiswa

**K**egiatan Parlemen Kampus menjadi agenda rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Pengelolaan Museum Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Tahun 2024 ini acara Parlemen Kampus diselenggarakan di Universitas Hasanuddin dengan mengangkat isu tentang RUU Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai bahan seminar nasional dan simulasi rapatnya.

Agar simulasi rapat berjalan baik sesuai mekanisme persidangan di DPR RI, baik secara teknis dan substantif, para peserta terlebih dahulu mendapat materi tentang isu RUU ITE dari Anggota DPR RI dan para pakar, serta materi tentang tugas, fungsi, wewenang, dan mekanisme persidangan di DPR RI dari Deputy Bidang Persidangan Setjen DPR RI.

“Kegiatan (Parlemen Kampus) ini adalah strategi komunikasi kita kepada para mahasiswa di Perguruan Tinggi agar mereka dapat mengetahui bagaimana kegiatan



FOTO: DEPPDPT

Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, saat memberikan sambutan pada kegiatan Parlemen Kampus 2024 di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (15/5/2024).

yang dilakukan oleh Anggota Dewan. Seperti kita diketahui, kegiatan utama di DPR adalah kegiatan rapat-rapat persidangan,” jelas Deputy Bidang Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini di Makassar, Sulsel, Rabu (15/5).

Ia menjelaskan, dengan adanya materi tentang mekanisme

persidangan dalam agenda acara Parlemen Kampus, para mahasiswa diharapkan dapat mengetahui alur-alur proses pengambilan keputusan di DPR sesuai fungsinya yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

Adapun kegiatan inti dari Parlemen Kampus 2024 adalah simulasi rapat, dimana peserta akan berperan sebagai Anggota DPR RI, yang membahas substansi pasal dalam pembahasan RUU ITE pada Rapat Panitia Kerja (Panja) dan Rapat Kerja (Raker). Kegiatan Parlemen Kampus 2024 kali ini merupakan kerja sama Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. **dep/aha**

KEGIATAN (PARLEMEN KAMPUS) INI ADALAH STRATEGI KOMUNIKASI KITA KEPADA PARA MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI AGAR MEREKA DAPAT MENGETAHUI BAGAIMANA KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DEWAN.

**Suprihartini**

Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya





**Mahasiswa program Magang Kampus Merdeka saat mengikuti Simulasi Sidang Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).  
FOTO: HAN/PDT**

